

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2016 - 2021**

**IMELDA RIMENDA PURBA
VIVIN TRI INDAWATI GULO**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
Imelda.rimenda.purba@gmail.com, vivingulo2016gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of Regional Original Income (PAD), and General Allocation Funds (DAU), on Capital Expenditures in West Nias Regency for the 2016-2021 period. This type of research is quantitative research. The data used in this study are secondary data. The population in this study includes reports on budget realization from establishment until 2021. The sample is budget realization reports from 2016-2021, which is for 6 years. The sampling technique in this study was using purposive sampling. The data analysis used to test the hypothesis was multiple linear regression with a significance level of 55 and using SPSS version 23. partially and simultaneously has no effect on regional spending.

Keywords: *Capital Expenditure, General Allocation Fund Local Revenue*

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 01 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dan maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada PEMDA juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian, PEMDA memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan PEMDA yang dibahas dan disetujui bersama oleh PEMDA dan DPRD dan diterapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus di perjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Abdul Halim (2001) menyatakan bahwa daerah yang ditanjung dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap

tingkat produktifitas masyarakat yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dana dari pemerintah pusat semakin rendah Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain – lain PAD yang sah;

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU suatu daerah adalah kebutuhan wilayah otonomi daerah yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah. Abdul Halim (2004) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan DAU suatu daerah dengan total kebutuhan DAU seluruh daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing – masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD.

APBD tidak hanya mengandung unsur pendapatan saja, tapi juga belanja daerah, dimana belanja daerah adalah pengeluaran – pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah. Belanja daerah sendiri terdiri atas : Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga. Kelompok belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan Belanja Modal. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal/Belanja Modal yang merupakan pengeluaran dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Nugroho (2010) menyatakan bahwa peningkatan Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi juga produktivitas perekonomian.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Pergeseran Belanja Modal ini dilakukan untuk meningkatkan investasi modal yang tinggi maka kualitas dan perbaikan layanan publik juga dapat ditingkatkan, sehingga dapat berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi sumber PAD. Pemerintah daerah dituntut mampu mengalokasikan Belanja Modal dengan efisien karena Belanja Modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan (Rimbun C. D. Sidabutar; 2013) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Belanja Modal di pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pengaruh PAD dan DAU ini dapat diketahui ketika kedua variabel ini diregresikan terhadap Belanja Modal.

DASAR TEORI

1. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip – prinsip menurut Devas, dkk (1989), yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah di tentukan.
3. Kejujuran
Hal – hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar – benar jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
Pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang serendah – rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.
5. Pengendalian
Aparatur pengelolaan keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu aspek penting dari pemerintahan daerah adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang menduduki posisi penting. Pada hekekatnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing – masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian, maka APBD berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar – benar akan dapat dirasakan pada saat tertentu oleh masyarakat (Bana dalam Dasril, et al, 2004).

3. Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD yang berlaku adalah anggaran yang berimbang = dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan, bukan lagi anggaran

berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan dan pendapatan masing – masing daerah.

Struktur APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah terdiri atas sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah.
2. Belanja Daerah.
3. Pembiayaan.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni Pendapatan Asli Daerah serta lain – lain pendapatan yang sah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 32 Tahun 2004). Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu :

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain – lain PAD yang sah.

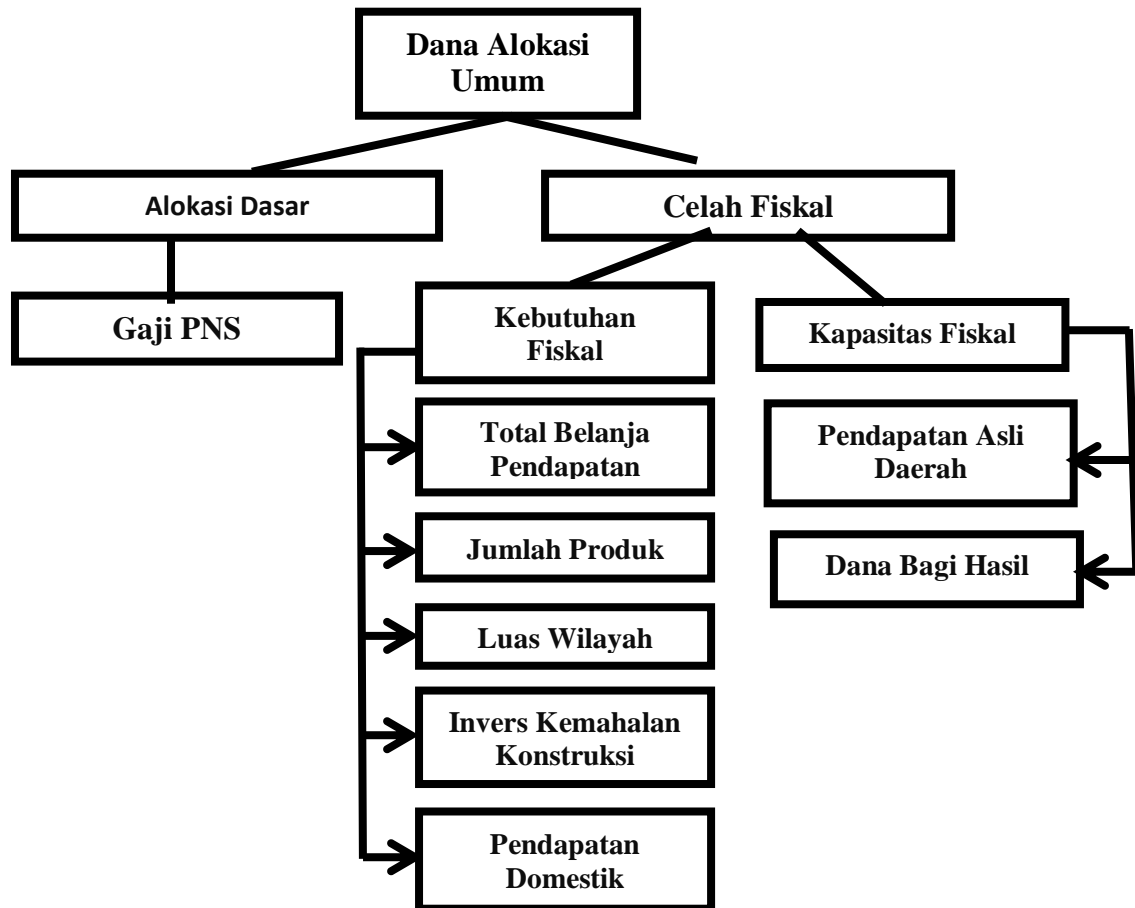
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terdiri atas :
yang sebesar – besarnya melalui program – program dan kegiatan – kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

5 .Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari UU No. 33 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan adalah APBN.

Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD. Beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu :

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber – sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. .
2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disetiap daerah tersebut.
4. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi disaat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.



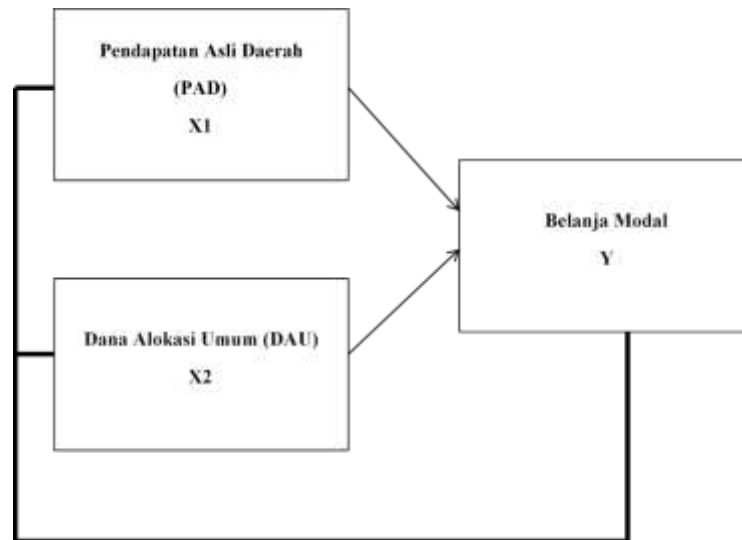
Gambar 1 Formula Dana Alokasi Umum

6. Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator Belanja Modal diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Dari penjelasan teori diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah,dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintahan kabupaten Nias Barat periode 2016-2021

Manfaat Penelitian

Maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini a

1. Memberikan informasi bahwa pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah dan diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih semangat mencari sumber khususnya dalam pendanaan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat agar mendukung program pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Daerah salah satunya kesadaran dalam membayar pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Nias Barat tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) yang beralamat di

Kawasan SKPD Terpadu Kabupaten Nias Barat, Onolimbu, Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, 22864.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008 : 115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dipandang mewakili populasi. Sampel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Tahun 2016 – 2021, maka jumlah data yang diolah adalah sebanyak 18 (PAD 6, DAU 6, Belanja Modal 6). Teknik penentuan sampel adalah *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel dipermudah.

Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu.

Adapun variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Indikatornya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Skala pengukurannya adalah skala rasio dalam satuan rupiah.
2. Dana Alokasi Umum (X2) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Belanja Modal (Y) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan inventaris yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Indikatornya diukur dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin serta belanja modal fisik lainnya. Skala pengukurannya adalah skala rasio dalam satuan rupiah. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dioperasikan dalam matematika (Sujarweni, 2014:21).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, Teknik dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang sudah diolah sebelumnya berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda (*multiple regretion*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan hipotesis penelitian ini. Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan Rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + e$$

Dimana : Y : Belanja Modal
 α : Konstantan
 β : Slope atau koefisien regresi atau intersept
PAD : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU : Dana Alokasi Umum
 e : error

Dalam penelitian ini digunakan dua uji, yaitu sebagai berikut:

Uji t

Uji T dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membangkitkan t hitung dengan tabel pada tingkat signifikan 5% (*level of significant* 5%) dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_a diterima,

jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel pada *level of significant* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*. Setidaknya ada empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana yang harus duluan dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Setelah dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, jika data yang tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan perbaikan pada uji tersebut sampai data memenuhi persyaratan asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki populasi data yang berdistribusi normal. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul ditengah. Demikian juga nilai rata – rata, modus dan median relatif dekat.

Uji Normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan uji *kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan

1). Jika nilai signifikan $< 0,05$, berarti distribusi data normal

2). Jika nilai signifikan $> 0,05$, berarti distribusi data tidak normal.

Analisis grafik dilakukan dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik *normal p-p plot of regression standardized residual*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu metode regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel – variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Data dinyatakan memiliki gangguan multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 5.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu kepengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana tidak terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya atau disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yakni ZPRED.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara memenuhi persyaratan yang dimana tidak terdapat autokorelasi.

Uji Autokorelasi dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan Uji *Durbin Watson*. Yang dimaksud dengan Uji *Durbin Watson* adalah mencari nilai *Durbin Watson (DW)*, kemudian membandingkannya dengan nilai DW tabel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi PEMDA dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dan maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada PEMDA juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus

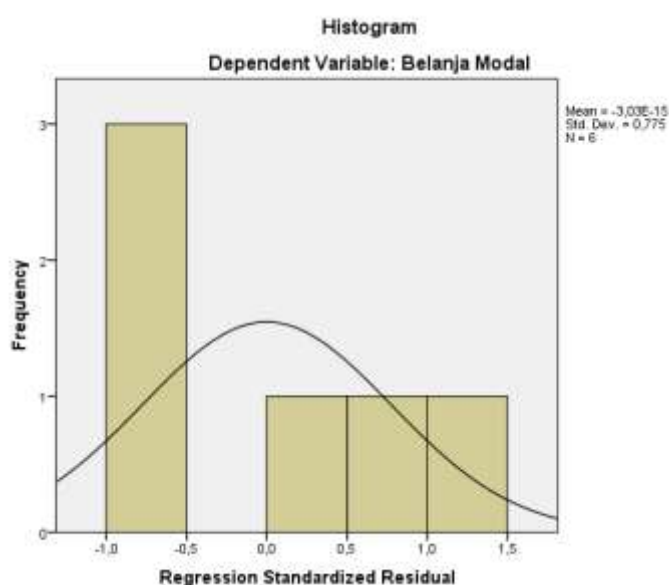
Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum serta nilai rata-rata standard deviasi dari masing-masing variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PAD, DAU, dan Variabel dependent yaitu Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Uji Asumsi Normalitas
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	6	15,691,708,086,10	40,193,008,207,19	2,452,373,583,972,50	1,075,960,086,983,518
DAU	6	329,531,869,000,00	359,696,030,000,00	34,338,844,573,616,67	1,102,077,509,949,274
Belanja Modal	6	66,782,615,303,00	247,896,475,505,00	16,062,496,636,203,33	6,438,393,390,653,554
Valid N (listwise)	6				

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal dapat dilihat pada tabel 2 di bawah



Tabel 2 :

terlihat bahwa variabel terikat yaitu variabel Belanja Modal mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau kekanan.

Uji multikolinieritas

Menurut Ghazali (2005) salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melakukan uji VIF (*variance inflation factor*) yaitu jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	113.799.794.952,100	2,700		-4,214	,024		
PAD	0,016	,264	,071	4,862	,836	,964	1,037
DAU	0,345	,177	,009	4,401	,541	,964	1,037

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. **Tabel 3**

Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah = 1,037 : Dana Alokasi Umum = 1,037 masing

- masing <10 serta memiliki nilai tolerance >0,10 yaitu Pendapatan Asli Daerah = 0,016 Dana Alokasi Umum = 0,345 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada autokorelasi model regresi yang baik adalah regresi bebas autokorelasi dengan menggunakan uji statistik dari Durbin Waston. Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson, berikut hasil berdasarkan uji Durbin-Watson pada tabel 4 .:

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,673 ^a	,346	,358	1,835	2,735

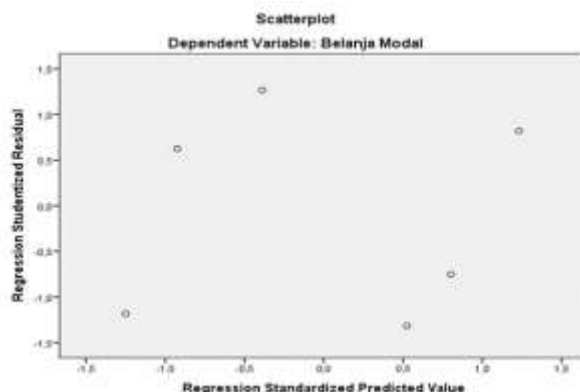
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Tabel 4.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Nilai DW 2,735 untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan Durbin-Watson. Ghazali menentukan nilai Durbin-Watson (DW) yaitu dengan DW sebesar 2,735 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, $n = 18$, $k = 2$. Berdasarkan tabel DW didapatkan nilai batas bawah (dL) = 1,0461 dan nilai batas atas (dU) = 1,5353. Nilai $DW > dU$ ($2,735 > 1,5353$), oleh karena $(4-DW) > dL$ ($1,265 > 1,0461$) hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak ada auto korelasi positif maupun negatif (bebas uji autokorelasi) pada persamaan regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.5 tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik *scatterplot*, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan

Pengujian Hipotesis Hasil Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	113.799.794.952,100	2,700		-4,214	,024
PAD	0,016	,264	,071	4,862	,836
DAU	0,345	,177	,009	4,401	,541

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Tabel 5 .

Berdasarkan Tabel 5. diperoleh rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 113.799.794.952,100 + 0,016PAD + 0,345DAU + e$$

Berdasarkan rumus regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variable independen terhadap Belanja Modal yaitu :

1. Nilai konstanta Belanja Modal (Y) sebesar 113.799.794.952,100 yang artinya jika variable independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum adalah 0 atau tidak ada maka nilai tetap Belanja Modal sebesar 113.799.794.952,100.
2. Nilai koefisien regresi (X1) adalah 0,016 pada variabel Pendapatan Asli Daerah yang berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah sebesar 1,6%.
3. Nilai koefisien regresi (X2) adalah 0,345 pada variabel Dana Alokasi Umum yang berarti setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah sebesar 34,5%.

Dari pengujian asumsi dapat disimpulkan bahwa data yang ada berdistribusi, tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian atas hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

Uji Statistik t (Uji t)

1. Dengan membandingkan statistik T_{hitung} dengan statistik T_{tabel} . Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
2. Berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas $> 0,05\%$, maka H_0 diterima. Jika probabilitas $< 0,05\%$, maka H_0 ditolak.
- 3.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	113.799.794.952,100	2,700		-4,214	,024
PAD	0,016	0,264	,071	4,862	,836
DAU	0,345	0,177	,009	4,401	,541

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

1. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t), Diketahui nilai signifikansi (sig) variabel :
Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai signifikan sebesar $0,836 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,862 > 1,753$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

- Dana Alokasi Umum mempunyai nilai signifikan sebesar $0,541 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,401 > 1,753$, Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Signifikan model regresi secara simultan di uji dengan melihat perbandingan antara F_{tabel} dan F_{hitung} . Selain itu akan dilihat nilai signifikansi, dimana jika nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji F digunakan untuk menguji hubungan regresi antar variabel independen dengan variabel dependen.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1961615106328 5306000000000 0,000	2	9808075531642 6530000000000 ,000	2,51	,12 ^b
Residual	1110303663120 3716000000000 ,000	3	3701012210401 2385000000000 ,000		
Total	2072645472640 5678000000000 0,000	5			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Berdasarkan hasil uji F di atas, maka nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $2,51 < 3,63$ dengan tingkat signifikan $0,12 < 0,05$. Berdasarkan tingkat signifikansi tersebut, maka hasil uji F dalam penelitian ini diketahui bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,673	,346	,358	1,835	2,735

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,346 atau 34,6 %. Hal ini berarti hanya 34,6 % variabel anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen sedangkan sisanya 65,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Dari hasil (uji t) Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizanda Ratna Pradita (2011), yang telah membuktikan secara empiris Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- Dari hasil (uji t) Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dan Anggiat Situngkir (2009).

3. Hasil uji F menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,346 atau 34,6 %. Hal ini berarti hanya 34,6 % variabel realisasi anggaran Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen sedangkan sisanya 65,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

Saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat :

1. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya melaksanakan sosialisasi dikalangan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Gustiana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2012. *Jurnal*. Kabupaten Soppeng.
- Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Bana dalam Dasril, et al. 2004. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal*. : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Buku, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, UNIKA : Fakultas Ekonomi.
- Devas, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Diponegoro.
- Fiona Puspita dan Devi Purwanto. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Jurnal* . Provinsi Jawa Tengah.
- Ghozali, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH*. Jakarta : Salemba Empat.
- Legrenzi dan Milas. 2001. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *Jurnal*. : Bali.
- Mardiasmo dalam Dasril, et al, 2004, *Akuntansi Sektor Publik* :Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis, dan Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana : Bali.
- No. 32 Tahun 2004, *Otonomi Daerah*.
- Nugroho. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan metode USDP*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016, *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, *Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan*
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*

- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ratna Pradita, Rizandra. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal*. Jawa Timur.
- Sidabutar, Rimbun. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Medan : Universitas HKBP NOMMENSEN.
- Sipayung, Royani 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun. *Skripsi*. Medan : Perpustakaan Unika Santho Thomas.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. : Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara, USU Medan.
- Pajiah, Sri Puji. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikm *Jurnal*. Tasik Malaya.
- Sujarweni, 2014:21, *Dana Alokasi Umum Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening* : Sulawesi Utara.
- Trihendradi, Cornelius. 2008 : 184. *Step by step SPSS 18 : Analisis data statistik*: Yogyakarta.
- Uhise. 2013. *Dana Alokasi Umum Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening* : Sulawesi Utara.
- Undang – undang No. 105 Tahun 2000, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan Retribusi daerah*.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- UU No. 46 Tahun 2008, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*.
- www.FormulaDanaAlokasiUmum.com
- www.kemenkeu.go.id
- www.NiasBarat.Info.com
- www.peraturan.bpk.go.id